

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap nasib daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjamin keutuhan aset daerah. Pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan tugas umum, pembangunan, dan pelayanan publik wajib menyajikan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk melihat dan mengkur apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala jenis kekayaan yang dapat diubah menjadi milik daerah dalam jumlah besar. kaitannya dengan pendanaan daerah. hak dan kewajiban daerah. Pengukuran kinerja sangat penting dalam menilai tanggung jawab lembaga dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini ditetapkan untuk memberikan pedoman mengenai bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah harus dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dapat menggunakan analisis rasio-rasio keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dari satu periode ke periode lainnya sehingga dapat diamati kecenderungannya. Melalui analisis rasio keuangan, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kemandirian keuangan daerah dalam

membiyai pelaksanaan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mencapai pendapatan daerah, mengukur sejauh mana kegiatan pemerintah membelanjakan pendapatan daerah, dan mengukur APBN.

Disporapar Kota Padang Panjang dapat di katakan sebagai Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai pengguna anggaran di bentuk untuk meningkatkan kinerja keuangannya menggunakan konsep value for money yang berarti konsep pengelolaan sector public yang berlandaskan pada tiga faktor utama yaitu, ekonomi, efisiensi, efektivitas. Disporapar Kota Padang Panjang yang memegang sektor pariwisata di Kota Padang Panjang di tuntut agar dapat meningkatkan pelayanan pada objek wisata Kota Padang Panjang agar dapat meningkatkan penerimaan PAD pada Disporapar Kota Padang Panjang

Pengukuran Kinerja Keuangan perlu di lakukan guna untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu pengukuran ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kedepanya. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penulis dapat menyimpulkan yaitu bagaimana kondisi perkembangan dalam pengelolan pendapatan dan belanja daerah pada Disporapar Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu menganalisa bagaimana perkembangan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Disporapar Kota Padang Panjang

1.4 Manfaat Magang

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa manfaat antara lain:

1. Penulis

Mengambarkan bagaimana cara menilai dan mengukur Kinerja Pemerintah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah di Disporapar Kota Padang Panjang

2. Pemerintah

Dapat di jadikan sebagai alat ukur dalam menilai apakah kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah apakah sudah sesuai dengan yang di rencanakan khususnya di Disporapar Kota Padang Panjang

1.5 Metode Penulisan

1.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pembicaraan berupa tanya jawab secara langsung dengan informan mengenai pembahasan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur.

2.1 Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber artikel,buku,laporan dan sumber lainnya yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang di kaji.

1.6 Waktu dan Tempat Magang

Pada progam magang ini penulis memilih Disporapar Kota Padang Panjang di Jl.Bustanil Arifin,Silaying Bawah,Kec.Padang Panjang Barat,Kota Padang Panjang,Sumatra Barat sebagai tempat magang. Dalam menjalankan kegiatan ini, penulis menentukan waktu magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja Praktek ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang,manfaat magang,metode penulisan, tempat waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori mengenai prosedur pencairan dana belanja langsung pada Disporapar Kota Padang Panjang.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata Kota Padang Panjang, struktur organisasi dan tugas dari masing-masing bidang kerja instansi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Disporapar Kota Padang Panjang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mengambil beberapa pokok-pokok penting yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang terdapat di dalam kesimpulan dan saran.

